



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 27559-27566

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## BAPPEDA Dalam Mendorong Investasi di Bidang Infrastruktur dan Parawisata Melalui Kolaborasi Pemerintah dan Swasta di Kota Parepare

Rahmad Dani<sup>1</sup>, Fitriyani Syukri<sup>2</sup>, Fajar Ladung<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Parepare

<sup>1</sup>[rahmaddani020304@gmail.com](mailto:rahmaddani020304@gmail.com), <sup>2</sup>[fitriyanisyukri19@gmail.com](mailto:fitriyanisyukri19@gmail.com), <sup>3</sup>[fajarlading35@gmail.com](mailto:fajarlading35@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui peran BAPPEDA dalam membentuk dan mengoordinasikan kolaborasi pemerintah daerah dan sektor swasta untuk mendorong investasi, khususnya infrastruktur dan pariwisata di Kota Parepare. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan lapangan. Informan dipilih secara purposive sampling berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan dalam perencanaan pembangunan dan investasi daerah. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAPPEDA berperan sebagai perencana melalui perumusan kebijakan pembangunan, pengintegrasian investasi dalam RPJMD dan RKPD, serta penetapan prioritas berdasarkan potensi daerah, kebutuhan infrastruktur, pariwisata, daya saing, dan kemudahan investasi. Sebagai koordinator, BAPPEDA melakukan koordinasi melalui rapat, Musrenbang, forum konsultasi publik, FGD, dan forum komunikasi. Kolaborasi dengan sektor swasta diwujudkan melalui pembiayaan, pemanfaatan aset, penyediaan layanan, pengembangan kawasan wisata dan komersial, penerapan teknologi, promosi, serta penciptaan lapangan kerja. Ketertarikan investasi menunjukkan kecenderungan meningkat, terutama pada penyediaan air bersih, persampahan, perhotelan, pusat perbelanjaan, kuliner, dan rekreasi.

**Kata Kunci:** BAPPEDA, Investasi Daerah, Kolaborasi, Sektor Swasta, Infrastruktur, Pariwisata

### 1. Latar Belakang

Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan investasi merupakan isu strategis yang menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi di tingkat regional. Investasi sebagai salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi berkelanjutan tidak hanya berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga mendorong inovasi, peningkatan daya saing, serta pemerataan pembangunan (Cinta, C., Sabrina, S., Herlina, H., Awalia, R., Asis, A. B., Al-Fajri, A., & Masyhudi, D., 2025).

Melalui investasi, pemerintah daerah dapat meningkatkan kapasitas ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama akibat keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kondisi tersebut menuntut adanya keterlibatan sektor swasta sebagai mitra strategis dalam pembangunan daerah guna mengatasi keterbatasan fiskal serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan.

Dalam konteks pembangunan daerah, investasi memegang peranan penting sebagai penggerak utama aktivitas ekonomi. Tanpa adanya investasi yang memadai, pembangunan daerah akan sulit berjalan secara optimal. Oleh karena itu, pengalokasian dan pengelolaan investasi perlu direncanakan secara sistematis melalui perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya publik yang tersedia serta meningkatkan kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai ekonomi secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Secara yuridis, peran pemerintah daerah dalam mendorong investasi daerah memiliki dasar hukum yang kuat dalam kerangka desentralisasi dan hukum penanaman modal di Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan guna meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah, termasuk dalam penciptaan iklim investasi yang kondusif. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menegaskan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjamin kepastian hukum serta memberikan kemudahan perizinan bagi investor.

BAPPEDA Dalam Mendorong Investasi di Bidang Infrastruktur dan Parawisata Melalui Kolaborasi Pemerintah dan Swasta di Kota Parepare

Efektivitas peran tersebut sangat bergantung pada harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat menghambat investasi (Putra & Shara, 2025).

Selain itu, kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta memperoleh legitimasi melalui Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), yang menekankan pentingnya kerja sama dalam penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik guna mendukung pembangunan ekonomi daerah (Adiyanta, 2025; Arifin, 2025).

Dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator dan katalisator pembangunan. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta menjadi strategi penting dalam mengoptimalkan potensi daerah serta mengatasi keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Melalui kolaborasi tersebut, pemerintah daerah dapat memanfaatkan keunggulan sektor swasta, baik dari sisi pendanaan, teknologi, maupun manajemen, guna mempercepat pembangunan serta meningkatkan daya tarik investasi daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai lembaga perencana pembangunan di daerah memiliki peran strategis dalam mendorong investasi daerah. BAPPEDA bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan, mengoordinasikan perencanaan antar perangkat daerah, serta memfasilitasi sinergi antara pemerintah daerah dan sektor swasta. Dengan fungsi tersebut, BAPPEDA menjadi aktor penting dalam mengintegrasikan kebijakan investasi ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sehingga arah pembangunan daerah dapat berjalan secara terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan (Dewi & Zakia, 2024; Gusriadi, 2025).

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepare Tahun 2018–2023, pemerintah daerah menetapkan arah pembangunan daerah yang menekankan penguatan sektor jasa sebagai penggerak utama perekonomian daerah, termasuk sektor perdagangan, pendidikan, kesehatan, dan pariwisata. Salah satu strategi pembangunan yang ditempuh adalah meningkatkan investasi daerah melalui pengembangan infrastruktur serta peningkatan daya saing ekonomi lokal. Kebijakan ini menunjukkan bahwa investasi menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah di Kota Parepare.

Perkembangan investasi di Kota Parepare dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang cukup positif. Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), realisasi investasi di Kota Parepare pada tahun 2024 mencapai sekitar Rp867 miliar yang berasal dari investasi usaha mikro, kecil, dan non-UMK. Realisasi investasi tersebut didominasi oleh sektor perdagangan yang menjadi salah satu sektor penggerak utama aktivitas ekonomi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Parepare memiliki potensi yang cukup besar dalam menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di berbagai sektor ekonomi daerah.

Selain itu, realisasi investasi pada triwulan I tahun 2025 mencapai sekitar Rp50,7 miliar, meningkat dibandingkan dengan realisasi investasi pada triwulan I tahun 2024 yang sebesar Rp11,5 miliar. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan minat investasi di Kota Parepare. Meskipun demikian, investasi yang masuk masih didominasi oleh sektor perdagangan dan jasa, sehingga potensi investasi pada sektor strategis seperti infrastruktur dan pariwisata masih perlu dikembangkan secara lebih optimal.

Namun demikian, dalam implementasinya upaya mendorong investasi di Kota Parepare masih menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan anggaran daerah, belum optimalnya koordinasi antarinstansi, serta perencanaan pembangunan yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan kebutuhan dunia usaha menjadi kendala dalam menarik investasi swasta. Selain itu, sinergi antara pemerintah daerah dan investor belum berjalan secara optimal sehingga potensi ekonomi daerah yang dimiliki belum dimanfaatkan secara maksimal.

Kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta menjadi salah satu solusi strategis dalam mengatasi keterbatasan tersebut. Melalui kemitraan yang efektif, pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi pelaksanaan program pembangunan, mempercepat penyediaan infrastruktur, serta mendorong pengembangan ekonomi lokal. Namun demikian, efektivitas kolaborasi tersebut sangat bergantung pada mekanisme kerja sama yang diterapkan, kualitas koordinasi antaraktor, serta peran lembaga perencana daerah dalam memfasilitasi proses kolaborasi tersebut (Taufiqurrachman et al., 2024).

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas peran perencanaan pembangunan serta kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam mendorong investasi daerah. Namun, kajian yang secara khusus menelaah peran BAPPEDA sebagai aktor perencana dalam memfasilitasi dan mengoordinasikan kolaborasi investasi daerah, khususnya di Kota Parepare, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk

mengkaji lebih mendalam mengenai peran BAPPEDA Kota Parepare dalam mendorong investasi daerah melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta, dengan fokus pada bentuk dan mekanisme kolaborasi yang terjadi dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

## **2. Metode Penelitian**

### **2.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam fenomena mengenai peran BAPPEDA dalam mendorong investasi daerah melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta. Penelitian kualitatif berfokus pada pengumpulan dan analisis data berupa kata-kata, baik lisan maupun tulisan, serta tindakan atau aktivitas yang diamati di lapangan (Adiwijaya et al., 2024). Penelitian dilaksanakan secara langsung di lapangan untuk memperoleh informasi faktual mengenai proses perencanaan, koordinasi, dan kolaborasi investasi di Kota Parepare.

### **2.2. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilaksanakan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa BAPPEDA memiliki peran strategis dalam perencanaan dan koordinasi pembangunan daerah, termasuk pengintegrasian kepentingan investasi dalam perencanaan pembangunan. Penelitian dilaksanakan selama kurang lebih tiga bulan setelah seminar proposal.

### **2.3. Informan Penelitian**

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam perencanaan pembangunan serta investasi daerah. Informan terdiri atas informan kunci, informan utama, dan informan pendukung. Informan kunci terdiri dari Kepala BAPPEDA Kota Parepare. Informan utama meliputi Kepala Bidang Perencanaan BAPPEDA, staf BAPPEDA yang menangani perencanaan pembangunan, serta pejabat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Parepare. Informan pendukung adalah pelaku usaha atau investor pada sektor prioritas daerah.

Jumlah informan awal sebanyak 6 orang, yang terdiri atas 1 Kepala BAPPEDA, 1 Kepala Bidang Perencanaan, 2 staf BAPPEDA, 1 pejabat DPMPTSP, dan 1 pelaku usaha. Jumlah tersebut bersifat fleksibel dan dapat berkembang sesuai kebutuhan penelitian dengan mempertimbangkan prinsip kecukupan dan kejenuhan data (data saturation).

### **2.4. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian diarahkan pada peran BAPPEDA, kolaborasi pemerintah daerah dan sektor swasta, serta investasi daerah. Peran BAPPEDA dikaji berdasarkan kemampuannya dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan, mengintegrasikan kepentingan investasi ke dalam dokumen perencanaan daerah, serta mengoordinasikan perangkat daerah dan pihak terkait. Kolaborasi pemerintah daerah dan sektor swasta dikaji melalui proses komunikasi, perencanaan bersama, pemanfaatan aset daerah, penyediaan layanan, dan keterlibatan sektor swasta dalam program pembangunan. Sementara itu, investasi daerah dipahami secara kualitatif melalui keterlibatan dan kontribusi sektor swasta dalam pembangunan Kota Parepare, khususnya pada bidang infrastruktur dan pariwisata, yang dilihat dari proses, persepsi, keterlibatan, serta dampak kebijakan dan kolaborasi yang dilakukan.

### **2.5. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari informan melalui wawancara dan observasi mengenai peran BAPPEDA, koordinasi, kolaborasi pemerintah dengan sektor swasta, serta investasi daerah di Kota Parepare. Data primer digunakan untuk memperoleh informasi berdasarkan pengalaman dan kondisi yang terjadi di lapangan (Mardatillah & Murhayati, 2025).

Data sekunder diperoleh dari RPJMD, RKPD, dokumen investasi, peraturan perundang-undangan, laporan instansi, literatur, dan dokumen relevan lainnya. Data tersebut digunakan untuk melengkapi dan memperkuat informasi dari data primer. Penggunaan dokumen sebagai sumber data dapat membantu memberikan konteks serta mengonfirmasi hasil wawancara dan observasi (Chand, 2025).

### **2.6. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung aktivitas, proses koordinasi, serta kondisi yang berkaitan

dengan perencanaan pembangunan dan investasi di Kota Parepare. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan pengetahuan dan keterlibatan mereka terhadap fokus penelitian, khususnya mengenai peran BAPPEDA, mekanisme koordinasi, kolaborasi pemerintah dengan sektor swasta, dan investasi daerah. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang relevan, seperti RPJMD, RKPD, kebijakan investasi, laporan instansi, peraturan daerah, dan dokumentasi kegiatan. Penggunaan observasi, wawancara, dan dokumentasi sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif yang menekankan penggalian informasi secara mendalam melalui berbagai sumber data. Chand (2025) menjelaskan bahwa wawancara, observasi, dan analisis dokumen merupakan metode utama dalam penelitian kualitatif yang dapat digunakan secara komplementer untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap fenomena penelitian.

Ketiga teknik tersebut digunakan secara terpadu untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan meningkatkan kredibilitas hasil penelitian. Informasi yang diperoleh melalui wawancara dibandingkan dengan hasil observasi dan dokumen yang tersedia sehingga peneliti dapat melihat kesesuaian informasi dari berbagai sumber. Neupane et al. (2026) menegaskan bahwa pemilihan teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif perlu disesuaikan dengan tujuan penelitian dan karakteristik fenomena yang dikaji, sementara penggunaan beberapa metode dapat membantu menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual. Dengan demikian, observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam penelitian ini digunakan secara saling melengkapi untuk memperoleh data yang mendalam mengenai peran BAPPEDA dan kolaborasi pemerintah dengan sektor swasta dalam mendorong investasi daerah di Kota Parepare.

## 2.7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang dilakukan secara sistematis sejak proses pengumpulan data hingga penelitian selesai. Menurut Sugiyono (2022), analisis data kualitatif dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, dan mengelompokkan data yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk uraian naratif secara sistematis untuk memudahkan peneliti memahami hubungan antartemuan. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan menginterpretasikan pola, hubungan, dan makna dari data yang telah dianalisis sehingga diperoleh kesimpulan yang dapat menjawab fokus dan tujuan penelitian.

Dalam penelitian ini, proses analisis dilakukan dengan mengelompokkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi berdasarkan fokus penelitian, yaitu peran BAPPEDA sebagai perencana dan koordinator, kolaborasi pemerintah dengan sektor swasta, serta investasi daerah. Data dari berbagai sumber kemudian dibandingkan untuk melihat kesesuaian informasi dan memperkuat hasil penelitian. Proses analisis dilakukan secara berulang selama penelitian sehingga temuan yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi mengenai peran BAPPEDA dan kolaborasi pemerintah dengan sektor swasta dalam mendorong investasi di Kota Parepare.

## 2.8. Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk memastikan bahwa data dan temuan penelitian memiliki tingkat kepercayaan yang memadai. Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data dapat dilihat melalui kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Kredibilitas dalam penelitian ini dilakukan melalui triangulasi sumber dan teknik dengan membandingkan informasi dari berbagai informan serta mencocokkan hasil wawancara dengan observasi dan dokumentasi. Marlina et al. (2025) menjelaskan bahwa triangulasi dapat meningkatkan kredibilitas penelitian melalui penggunaan berbagai sumber dan teknik dalam memeriksa kesesuaian data.

Transferabilitas dilakukan dengan menyajikan hasil penelitian secara rinci dan sesuai dengan konteks penelitian, sedangkan dependabilitas dilakukan melalui pencatatan proses penelitian secara sistematis. Konfirmabilitas dilakukan dengan memastikan bahwa temuan penelitian didasarkan pada data dan bukti yang diperoleh dari lapangan, bukan semata-mata berdasarkan pandangan peneliti. Lim (2025) menjelaskan bahwa penerapan keempat kriteria tersebut penting untuk menunjukkan keterlacakan proses penelitian dan memastikan temuan memiliki dasar yang jelas pada data yang diperoleh.

## 3. Hasil dan Diskusi

### 3.1. Peran BAPPEDA dalam Mendorong Investasi Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAPPEDA Kota Parepare memiliki peran strategis dalam mendorong investasi daerah melalui fungsi sebagai perencana dan koordinator. Sebagai perencana, BAPPEDA menyusun arah kebijakan pembangunan yang selaras dengan visi dan misi kepala daerah, kebijakan pemerintah pusat, serta

prioritas pembangunan daerah. Kepala Bidang BAPPEDA menjelaskan bahwa BAPPEDA berperan dalam merumuskan kebijakan strategis, memetakan potensi investasi unggulan, khususnya pada sektor infrastruktur dan pariwisata, serta mengintegrasikan kepentingan investasi ke dalam dokumen RPJMD dan RKPD. Dalam menentukan prioritas pembangunan, BAPPEDA mempertimbangkan potensi ekonomi, kebutuhan infrastruktur, daya saing daerah, kemampuan anggaran, serta kemudahan proses investasi.

Selain sebagai perencana, BAPPEDA juga berperan sebagai koordinator melalui penyalarsan program antarperangkat daerah yang berkaitan dengan investasi, seperti Dinas PUPR, DPMPTSP, dan Dinas Pariwisata. Koordinasi dilakukan melalui rapat koordinasi, Musrenbang, konsultasi publik, serta pemantauan dan evaluasi program. Kepala Bidang BAPPEDA menyatakan bahwa koordinasi dilakukan untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai dengan arah pembangunan daerah. Meskipun masih terdapat kendala berupa perbedaan prioritas antarinstansi dan keterbatasan anggaran, BAPPEDA berupaya memperkuat komunikasi dan menyalarskan program antarpihak. Temuan ini menunjukkan bahwa fungsi perencanaan dan koordinasi BAPPEDA menjadi bagian penting dalam menciptakan arah pembangunan yang mendukung investasi daerah.

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mendorong investasi, BAPPEDA tidak hanya berorientasi pada penyusunan dokumen perencanaan, tetapi juga melakukan identifikasi terhadap berbagai potensi dan peluang investasi yang dapat dikembangkan di Kota Parepare. Penentuan sektor yang menjadi prioritas dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi ekonomi daerah, ketersediaan serta kebutuhan infrastruktur, potensi pariwisata, pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, ketersediaan aset dan lahan, kondisi pasar, kebijakan pemerintah, kemampuan pembiayaan daerah, serta risiko investasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa BAPPEDA berupaya membangun perencanaan investasi yang lebih aplikatif dengan mempertemukan potensi daerah dan kebutuhan pembangunan dengan peluang yang dapat ditawarkan kepada sektor swasta. Dengan demikian, peran BAPPEDA tidak hanya bersifat administratif dalam menyusun perencanaan, tetapi juga strategis dalam menciptakan keterkaitan antara potensi daerah, kebijakan pembangunan, kesiapan infrastruktur, dan peluang investasi sehingga dapat mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif di Kota Parepare.

### 3.2. Kolaborasi Pemerintah dan Sektor Swasta

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi Pemerintah Kota Parepare dengan sektor swasta dilakukan melalui mekanisme kerja sama yang melibatkan proses identifikasi peluang investasi, penjajakan kesepahaman, penyusunan MoU, perjanjian kerja sama teknis, pelaksanaan, dan pemantauan. Kepala Bidang BAPPEDA menjelaskan bahwa bentuk kerja sama mencakup *Public Private Partnership* (PPP), pemanfaatan aset daerah, penyediaan layanan publik, serta pengembangan kawasan wisata dan komersial. Kolaborasi tersebut dilakukan melalui komunikasi dan perencanaan bersama agar kepentingan pemerintah dan sektor swasta dapat diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah.

Keterlibatan sektor swasta diwujudkan melalui penyertaan modal dan pembiayaan pembangunan, pengelolaan aset pemerintah, pengoperasian fasilitas wisata dan fasilitas umum, penerapan teknologi, promosi potensi daerah, serta penciptaan lapangan kerja. Pihak BAPPEDA menilai bahwa kolaborasi tersebut penting karena keterbatasan APBD menyebabkan pemerintah membutuhkan dukungan sektor swasta dalam pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan. Temuan ini menunjukkan bahwa kolaborasi pemerintah dan sektor swasta tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pembiayaan, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan inovasi, mempercepat pembangunan, dan memperluas peluang investasi daerah.

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa pola kolaborasi tersebut memberikan ruang bagi sektor swasta untuk berpartisipasi dalam pemanfaatan potensi daerah, terutama pada sektor yang membutuhkan dukungan investasi dan pengelolaan secara profesional. Pemerintah daerah berperan dalam menyediakan arah kebijakan, kepastian perencanaan, fasilitasi, serta koordinasi antarperangkat daerah, sedangkan sektor swasta memberikan dukungan berupa modal, teknologi, kemampuan manajerial, dan jaringan usaha. Dalam konteks penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik, kerja sama pemerintah dan badan usaha juga dapat menjadi alternatif untuk mengatasi keterbatasan pembiayaan daerah, sebagaimana diarahkan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Dengan pola tersebut, kolaborasi diharapkan mampu menciptakan pembagian peran dan risiko yang lebih jelas antara pemerintah dan pihak swasta sekaligus memastikan bahwa kegiatan investasi tetap memberikan manfaat bagi kepentingan pembangunan daerah dan masyarakat Kota Parepare.

### 3.3. Investasi Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketertarikan sektor swasta untuk berinvestasi di Kota Parepare mengalami perkembangan, terutama pada sektor infrastruktur dan pariwisata. Investasi yang berkembang meliputi penyediaan air bersih, pengelolaan persampahan, pembangunan hotel, pusat perbelanjaan, kawasan kuliner, dan tempat

rekreasi. Kepala Bidang BAPPEDA menyatakan bahwa meningkatnya minat investasi didukung oleh posisi strategis Kota Parepare, kebijakan pemerintah yang terbuka terhadap dunia usaha, serta upaya penyederhanaan proses perizinan.

Perkembangan investasi tersebut juga dipengaruhi oleh peran BAPPEDA dalam menyusun perencanaan dan mengoordinasikan berbagai pihak. Menurut informan BAPPEDA, perencanaan yang jelas dan terpadu dapat meningkatkan kepercayaan investor, sedangkan kolaborasi dengan sektor swasta mempercepat pelaksanaan pembangunan dan memperluas jangkauan investasi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa investasi daerah di Kota Parepare tidak hanya dipengaruhi oleh potensi ekonomi, tetapi juga oleh dukungan kebijakan, ketersediaan infrastruktur, kemudahan berusaha, serta sinergi antara pemerintah dan sektor swasta. Dengan demikian, peran BAPPEDA sebagai perencana dan koordinator serta kolaborasi pemerintah dengan sektor swasta menjadi faktor pendukung dalam menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif di Kota Parepare.

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan sektor swasta untuk berinvestasi juga mempertimbangkan sejumlah faktor pendukung dan risiko yang terdapat di daerah. Faktor tersebut meliputi ketersediaan dan kondisi infrastruktur, aksesibilitas, ketersediaan lahan atau aset daerah, potensi pasar, kepastian kebijakan, kemudahan perizinan, kondisi perekonomian, serta prospek keuntungan dari investasi yang dilakukan. Oleh karena itu, potensi investasi yang dimiliki Kota Parepare perlu didukung dengan kesiapan lingkungan investasi agar peluang yang telah diidentifikasi dapat direalisasikan secara optimal. Investasi yang masuk diharapkan tidak hanya meningkatkan aktivitas ekonomi daerah, tetapi juga memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja, pengembangan sektor usaha, peningkatan kualitas fasilitas dan pelayanan publik, serta pemanfaatan potensi daerah secara lebih produktif. Hal ini memperlihatkan bahwa investasi merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan daerah, sementara keberhasilannya sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam menciptakan kepastian, menyediakan infrastruktur pendukung, dan membangun hubungan yang sinergis dengan sektor swasta.

## **Pembahasan**

### **3.1. Peran BAPPEDA sebagai Perencana dalam Mendorong Investasi Daerah**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAPPEDA Kota Parepare menjalankan perannya sebagai perencana melalui penyusunan arah kebijakan pembangunan yang mempertimbangkan kepentingan investasi. Peran tersebut diwujudkan melalui penyelarasan visi dan misi kepala daerah, kebijakan pemerintah pusat, serta prioritas pembangunan daerah ke dalam RPJMD dan RKPD. BAPPEDA juga mempertimbangkan potensi ekonomi, kebutuhan infrastruktur, pengembangan pariwisata, daya saing daerah, dan keberlanjutan lingkungan dalam menetapkan prioritas pembangunan.

Temuan tersebut sesuai dengan teori perencanaan pembangunan yang menempatkan perencanaan sebagai proses penentuan tujuan dan langkah pembangunan secara terarah. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan Dewi dan Zakia (2024) yang menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan daerah berperan dalam mendorong investasi melalui penyusunan kebijakan dan pengintegrasian program pembangunan. Gusriadi (2025) juga menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menciptakan kondisi yang mendukung investasi.

Menurut peneliti, peran BAPPEDA sebagai perencana menjadi dasar penting dalam menciptakan arah pembangunan yang mampu membuka peluang investasi. Dengan mengintegrasikan kepentingan investasi ke dalam dokumen perencanaan, pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara lebih terarah sekaligus memberikan ruang bagi keterlibatan sektor swasta.

### **3.2. Peran BAPPEDA sebagai Koordinator dalam Mendorong Investasi Daerah**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAPPEDA menjalankan fungsi koordinasi melalui penyelarasan program antarperangkat daerah serta komunikasi dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan investasi, termasuk sektor swasta. Koordinasi dilakukan melalui rapat koordinasi, Musrenbang, forum konsultasi publik, FGD, serta pemantauan dan evaluasi program. Dalam pelaksanaannya, masih ditemukan kendala berupa perbedaan prioritas antarinstansi dan keterbatasan anggaran.

Temuan tersebut sesuai dengan teori peran pemerintah daerah, khususnya fungsi koordinasi dalam mengintegrasikan berbagai kepentingan pembangunan. Gusriadi (2025) menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran sebagai regulator dan fasilitator dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Sementara itu, Taufiqurrachman et al. (2024) menegaskan pentingnya koordinasi dan sinergi antara pemerintah dan swasta dalam mendukung pembangunan daerah.

Menurut peneliti, fungsi koordinasi BAPPEDA menjadi penting karena investasi melibatkan berbagai perangkat daerah dan pemangku kepentingan. Koordinasi yang berkelanjutan dapat mencegah tumpang tindih program, menyelesaikan kendala, dan memastikan pembangunan tetap sesuai dengan prioritas daerah.

### 3.3. Kolaborasi Pemerintah dan Sektor Swasta dalam Mendorong Investasi Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi Pemerintah Kota Parepare dengan sektor swasta dilakukan melalui komunikasi, koordinasi, dan perencanaan bersama yang difasilitasi oleh BAPPEDA. Kolaborasi tersebut mencerminkan konsep *Public Private Partnership* (PPP), di mana pemerintah dan sektor swasta bekerja sama dengan memanfaatkan sumber daya dan kemampuan masing-masing pihak dalam mendukung pembangunan.

Temuan ini sejalan dengan Taufiqurrachman et al. (2024) yang menunjukkan bahwa kerja sama pemerintah dan swasta dapat mendukung percepatan dan efektivitas pembangunan infrastruktur. Dalam konteks Kota Parepare, kolaborasi menjadi penting karena keterbatasan sumber daya dan anggaran pemerintah dapat dilengkapi oleh kemampuan pembiayaan, teknologi, dan keahlian sektor swasta.

Menurut peneliti, kolaborasi yang dibangun secara terarah dapat menciptakan sinergi antara kepentingan pemerintah dan peluang usaha sektor swasta. Dengan demikian, kolaborasi tidak hanya mendukung pembangunan, tetapi juga membuka ruang yang lebih luas bagi peningkatan investasi daerah.

### 3.4. Mekanisme Kerja Sama

Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme kerja sama pemerintah dan sektor swasta dilakukan melalui komunikasi, koordinasi, dan perencanaan bersama, mulai dari identifikasi peluang investasi, penjajakan kerja sama, penyusunan kesepakatan, pelaksanaan, hingga pemantauan. BAPPEDA berperan dalam memfasilitasi proses tersebut agar kerja sama tetap sesuai dengan arah pembangunan daerah.

Mekanisme tersebut sesuai dengan konsep PPP yang menekankan pentingnya pembagian peran, tanggung jawab, dan sumber daya antara pemerintah dan sektor swasta. Temuan ini relevan dengan penelitian Taufiqurrachman et al. (2024) yang menunjukkan bahwa koordinasi dan sinergi menjadi unsur penting dalam keberhasilan kerja sama pemerintah dan swasta.

Menurut peneliti, mekanisme kerja sama yang jelas dan komunikatif dapat meningkatkan kepercayaan antarpihak serta mengurangi potensi perbedaan kepentingan. Oleh karena itu, BAPPEDA memiliki posisi penting sebagai fasilitator yang menghubungkan perencanaan pembangunan dengan peluang kerja sama investasi.

### 3.5. Keterlibatan Sektor Swasta

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan sektor swasta di Kota Parepare diwujudkan melalui pembiayaan pembangunan, pengelolaan aset daerah, pengoperasian fasilitas wisata dan fasilitas umum, penerapan teknologi, promosi potensi daerah, serta penciptaan lapangan kerja. Keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa sektor swasta tidak hanya berfungsi sebagai penyedia modal, tetapi juga sebagai mitra dalam mendukung pembangunan daerah.

Temuan tersebut sesuai dengan konsep PPP yang menempatkan sektor swasta sebagai mitra pemerintah dalam penyediaan sumber daya dan pembangunan. Hasil ini juga sejalan dengan Taufiqurrachman et al. (2024) mengenai kontribusi swasta dalam pembangunan infrastruktur serta Rahman et al. (2023) yang menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam pengembangan pariwisata.

Menurut peneliti, keterlibatan sektor swasta dapat membantu pemerintah mengatasi keterbatasan sumber daya pembangunan. Namun, keterlibatan tersebut tetap membutuhkan peran pemerintah dalam memberikan arah, koordinasi, dan fasilitasi agar investasi yang dilakukan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

### 3.6. Ketertarikan dan Dampak Investasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor swasta memiliki ketertarikan untuk berinvestasi di Kota Parepare, terutama pada sektor infrastruktur dan pariwisata. Investasi yang berkembang meliputi penyediaan air bersih, pengelolaan persampahan, perhotelan, pusat perbelanjaan, kawasan kuliner, dan tempat rekreasi. Ketertarikan tersebut didukung oleh posisi strategis Kota Parepare, kebijakan pemerintah yang mendukung kemudahan usaha, serta penyederhanaan proses perizinan.

Temuan tersebut sejalan dengan Putra dan Lestari (2023) yang menunjukkan bahwa ketersediaan infrastruktur dapat meningkatkan daya tarik investasi. Rahman et al. (2023) juga menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata melalui infrastruktur dan pengembangan potensi daerah dapat menciptakan peluang bagi sektor swasta. Dalam penelitian ini, BAPPEDA berkontribusi melalui fungsi perencanaan dan koordinasi sehingga peluang investasi dapat diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah.

Menurut peneliti, dampak investasi di Kota Parepare tidak hanya dapat dilihat dari nilai modal yang masuk, tetapi juga dari keterlibatan sektor swasta dalam mendukung pembangunan dan aktivitas ekonomi daerah. Dengan demikian, peran BAPPEDA sebagai perencana dan koordinator, yang diperkuat oleh kolaborasi pemerintah dan sektor swasta, menjadi bagian penting dalam menciptakan peluang dan iklim investasi yang lebih kondusif di Kota Parepare.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa BAPPEDA Kota Parepare memiliki peran strategis dalam mendorong investasi daerah melalui fungsi perencanaan dan koordinasi. Sebagai perencana, BAPPEDA mengintegrasikan kepentingan investasi ke dalam dokumen RPJMD dan RKPD dengan mempertimbangkan potensi ekonomi, infrastruktur, pariwisata, daya saing, serta kebutuhan pembangunan daerah. Sebagai koordinator, BAPPEDA menyelaraskan program antarperangkat daerah dan membangun komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan pembangunan yang lebih terpadu. Di sisi lain, kolaborasi pemerintah dengan sektor swasta dilakukan melalui komunikasi, perencanaan bersama, penjajakan peluang investasi, kerja sama pemanfaatan aset dan pembangunan, serta keterlibatan swasta dalam pembiayaan, teknologi, pengelolaan fasilitas, dan penciptaan lapangan kerja. Ketertarikan sektor swasta terhadap investasi di Kota Parepare terutama berkembang pada sektor infrastruktur dan pariwisata, didukung oleh posisi strategis daerah, potensi ekonomi, kebijakan kemudahan berusaha, dan penyederhanaan proses investasi. Dengan demikian, sinergi antara perencanaan dan koordinasi BAPPEDA dengan keterlibatan sektor swasta menjadi faktor penting dalam menciptakan peluang investasi, mendukung pembangunan infrastruktur dan pariwisata, serta meningkatkan aktivitas ekonomi dan lapangan kerja di Kota Parepare. Keberlanjutan peningkatan investasi memerlukan perencanaan yang jelas, koordinasi yang efektif, mekanisme kerja sama yang baik, serta iklim investasi yang memberikan kemudahan dan kepastian bagi sektor swasta.

#### Referensi

1. Adiwijaya, S., Harefa, A. T., Isnaini, S., Raehana, S., Mardikawati, B., Laksono, R. D., Saktisya Putra, Purnamasari, R., Ningrum, W. S., Mayasari, Sari, N., & Muslim, F. (2024). *Buku ajar metode penelitian kualitatif*. PT Sonpedia Publishing.
2. Arifin, F. (2024). Administrative law analysis of regional investment incentive policies and its impact on regional economic growth. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 12(4), 819–834.
3. Chand, S. P. (2025). Methods of data collection in qualitative research: Interviews, focus groups, observations, and document analysis. *Advances in Educational Research and Evaluation*, 6(1), 303–317. <https://doi.org/10.25082/AERE.2025.01.001>
4. Cinta, C., Sabrina, S., Herlina, H., Awalia, R., Asis, A. B., Al-Fajri, A., & Masyhudi, D. (2025). Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan investasi lokal. *PENG: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 2(2), 2712–2715.
5. Dewi, M. B. A. I. J., & Zakia, Z. (2024). Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada pembangunan infrastruktur di Kabupaten Aceh Barat. *Tameh*, 11(2), 62–73.
6. Gusriadi, F. (2025). Integrasi nilai-nilai Maqasid Syariah Ash-Syatibi dalam RPJMD: Analisis kritis peran perencana BAPPEDA di Kabupaten Bungo. *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah*, 7(1), 77–101.
7. Lim, W. M. (2025). What is qualitative research? An overview and guidelines. *Australasian Marketing Journal*, 33(2), 199–229. <https://doi.org/10.1177/14413582241264619>
8. Mardatillah, N. A., & Murhayati, S. (2025). Data dan fakta penelitian kualitatif. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 13018–13028. <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.26900>
9. Marlina, E., Purwaningsih, M., Siagian, A. H. A. M., Al Hakim, S., & Maryati, I. (2025). Ensuring trustworthiness in qualitative research: The role of triangulation techniques. In R. Throne (Ed.), *Qualitative Research Methods for Dissertation Research* (pp. 347–376). IGI Global Scientific Publishing. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-3069-2.ch012>
10. Neupane, B. P., Dahal, N., Dhakal, R. K., Hasan, M. K., Villarama, J. A., & Fabros, B. G. (2026). Data collection methods in qualitative research: Researchers' reflections. *Frontiers in Research Metrics and Analytics*, 11, 1778160. <https://doi.org/10.3389/frma.2026.1778160>
11. Pemerintah Kota Parepare. (2019). *Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepare Tahun 2018–2023*.
12. Putra, A. R., & Lestari, D. (2023). Peran pembangunan infrastruktur daerah terhadap peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi lokal. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Daerah*, 8(1), 45–58.
13. Putra, I. B. G. S. P., & Shara, M. C. P. (2025). Pengaturan hukum investasi dalam mendorong strategi peningkatan penanaman modal di Indonesia: Perspektif hukum investasi. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(3).
14. Rahman, F., Ahmad, R., & Syamsuddin, M. (2023). Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 11(3), 210–223.
15. Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724.
16. Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.
17. Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62.
18. Saputra Adiwijaya, et al. (2024). *Buku ajar metode penelitian kualitatif*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
19. Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
20. Taufiqurrachman, Sari, A. L., Irwandi, I., Pratomo, S., & Indarti, C. F. S. (2024). Public-private partnerships for sustainable urban development: Lessons from Indonesian cities. *Visioner*, 16(1), 71–81.